

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Noor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan dan melakukan upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, maka sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, meningkatnya kualitas layanannya sebagai perwujudan kinerja penyelenggara pelayanan yang berkualitas serta menyajikan gambaran distrbusi tingkat kepuasan pelayanan dan sebaran tingkat kepuasan.

Lokasi pekerjaan/pengadaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Lingkup pekerjaan kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persiapan penyusunan IKM, terutama pengumpulan data-data sekunder yang relevan seperti Tupoksi Dinas, Struktur Organisasi, dan deskripsi kerja untuk setiap jenis penugasan.
2. Pengidentifikasian standar operasi yang sudah diterapkan saat ini (jika ada).
3. Pengidentifikasikan kebutuhan IKM.
4. Analisa kebutuhan IKM.
5. Penulisan dan penyusunan IKM.
6. Pelaporan.